I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia sangat luas, juga mempunyai puluhan bahkan ratusan adat budaya. Begitu juga dengan sistem kekerabatan yang dianut, berbeda sukunya maka berbeda pula sistem kekerabatannya. Masyarakat Lampung sebagai salah satu suku di Indonesia yang bertempat tinggal di ujung selatan Pulau Sumatera. Masyarakat Lampung dibedakan dalam dua golongan masyarakat adat yaitu golongan masyarakat Lampung Saibatin dan masyarakat Lampung Pepadun. Masyarakat yang beradat Saibatin memakai dialek (A api/apa) dan masyarakat Pepadun memakai dialek (O nyow/apa).

Masyarakat Lampung yang beradat Pepadun umumnya mendiami daerah-daerah pedalaman seperti Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulang Bawang serta Pubian. Masyarakat Lampung yang beradat Saibatin, umumnya menempati daerah sepanjang Teluk Betung, Teluk Semangka, Krui, Belalau, Liwa, Pesisir Raja Basa, Melinting dan Kalianda.¹

Pada susunan masyarakat hukum, bentuk perkawinan adat dapat dibedakan, yaitu bentuk perkawinan adat masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral.

¹ Ali imron. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hal. 1

Masyarakat yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki. Pada masyarakat patrilineal kaum pria mendapatkan penghargaan lebih tinggi dari kaum wanita. Masyarakat yang menganut sistem patrilineal umumnya melaksanakan bentuk perkawinan “jujur”, sedangkan di kalangan masyarakat adat yang mengikuti sistem kekerabatan matrilineal pada umumnya menganut bentuk perkawinan “semanda”, dan pada masyarakat adat parental menganut bentuk perkawinan “mentas”. Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” yaitu dalam bentuk barang atau uang kepada pihak isteri. Diterimanya barang atau uang jujur oleh pihak wanita maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya kepada keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu.²

Menurut hukum adat Lampung Pepadun setelah isteri berada di dalam lingkungan kerabat suami, maka isteri di dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena isteri dianggap sebagai pendamping atau pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan. Namun dengan demikian tidak berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si isteri dengan orang tua kerabat asalnya hilang sama sekali.

² Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya, hal. 72

Pada masyarakat Lampung Pepadun, anak-anak perempuan sejak kecil hingga dewasa sebelum menikah mengikuti kekerabatan ayahnya, namun setelah menikah akan menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain. Namun demikian tidak berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si wanita dengan orang tua kerabat asalnya hilang sama sekali, tetapi tugas dan peranannya sudah berlainan harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami dari pada kepentingan kerabat asalnya. Secara umum kedudukan istri pada masyarakat Lampung adalah di bawah pimpinan suami, isteri sebagai pendamping suami.

Berbicara mengenai kedudukan isteri dalam bentuk perkawinan jujur dengan perkembangan zaman yang menganut persamaan hak, keadilan, kesetaraan gender dan non diskriminasi merupakan dua sisi yg berbeda, yang mana dalam suatu perkawinan jujur kedudukan isteri tidak lebih dominan dari pada suami atau kedudukan suami lebih tinggi daripada kedudukan isteri dihubungkan dengan perkembangan zaman yang menghendaki adanya persamaan gender, keadilan dan kesetaraan. Sehingga bagaimana kedudukan isteri dalam bentuk perkawinan jujur pada masyarakat Lampung dewasa ini.

Guna memperjelas hal di atas, maka penulis tertarik untuk menuliskan dalam skripsi yang berjudul **“Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Jujur Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan”**

B. Rumusan Masalah dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam skripsi ini adalah:

Bagaimanakah Kedudukan Isteri Dalam Perkawinan Jujur Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan?

Pokok bahasan pada penelitian ini adalah:

- a. Kedudukan isteri dalam keluarga.
- b. Kedudukan isteri dalam kekerabatan.
- c. Kedudukan isteri terhadap harta kekayaan.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum adat yang didalamnya membahas tentang hukum perkawinan adat, kekerabatan adat dan waris adat pada masyarakat Lampung Pepadun. Kedudukan isteri dalam skripsi ini menjadi kajian hukum adat yang menyangkut perkawinan jujur pada masyarakat adat Lampung Pepadun. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perkawinan adat.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan isteri dalam perkawinan

jujur pada masyarakat Lampung Pepadun di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dengan pokok bahasan:

- a. Kedudukan isteri dalam keluarga;
- b. Kedudukan isteri dalam kekerabatan;
- c. Kedudukan isteri terhadap harta kekayaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum perkawinan adat, khususnya kedudukan isteri dalam bentuk perkawinan jujur pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan penelitian di bidang hukum khususnya hukum perdata;
2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dalam pokok bahasan mengenai kedudukan isteri dalam perkawinan jujur menurut hukum adat Lampung Pepadun.
3. Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.